

PERMASALAHAN, KEBIJAKAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN EKOWISATA DI INDONESIA

Oleh :

Muchroddi*

Rini Untari*

Dhian Tyas Untari*

*Candidate Doktor, Bogor Agriculture University

Email: djirotmg@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini merupakan sebuah conceptual paper yang bersumber dari data sekunder berupa publikasi – publikasi terkait tema kajian. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang ada dalam pengembangan ekowisata dan kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kapasitas manajemen ekowisata di Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ekowisata cara lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan, Ekowisata, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Indonesia yang dikenal sebagai Negara megabiodiversity menyimpan sekitar 27.500 species tumbuhan berbunga yang merupakan 10% dari seluruh species tumbuhan di dunia, memiliki 1.539 species burung (17% dari seluruh species burung di dunia) dan 515 *species reptilia* (16% dari seluruh species reptilian di dunia). Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 500 etnik budaya sebagai potensi sumberdaya serta kekayaan alam yang dapat menjadi pendukung dalam pengembangan pariwisata.

Sektor pariwisata di Indonesia menjadi salah satu sector unggulan dan menyumbangkan devisa komoditi non migas yang cukup signifikan. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 menunjukkan wisatawan mancanegara (wisman) di Tahun 2011 mencapai 7,64 juta, jumlah wisman yang masuk ke Indonesia naik mencapai 9,24 % jika dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 7 juta orang. Pemerintah di tahun 2012 menargetkan sebanyak 8 juta wisman yang akan mengunjungi Indonesia dan menghasilkan devisa sekitar US\$ 8,96 miliar, sementara untuk wisatawan nusantara sebesar Rp 171,5 triliun. Total pengeluaran wisman berdasarkan data Tahun 2011, Indonesia mengalami surplus. Perolehan devisa pariwisata tahun 2011 mencapai US\$ 8, 5 miliar atau tumbuh 11,8 % dibandingkan Tahun 2010 yang mencapai US\$ 7,6 miliar (Detik Finance, 2012).

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata sangat menjanjikan untuk dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia dan proyeksi pertumbuhan kepariwisataan tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan khususnya bagi lingkungan. Dampak lain yang diharapkan secara berkesinambungan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan

masyarakat lokal dan akhirnya pertumbuhan ekonomi nasional yang mendorong upaya pelestarian lingkungan. Konsep pariwisata yang awalnya hanya mementingkan potensi ekonomi tanpa memperhatikan factor lingkungan akan merusak kawasan dan pengembangan wisata itu sendiri. Beberapa bukti telah tampak dengan adanya kerusakan aset-aset lingkungan, hilangnya *biodiversity*, polusi, kemiskinan dan termarginalkannya masyarakat local. Kondisi tersebut terjadi akibat dari konsepsi pembangunan yang keliru. Kebijakan pembangunan belum secara komprehensif memahami prinsip-prinsip ekowisata.

Berbagai konsep dan definisi yang berkembang secara generik, ekowisata merupakan konsep tentang perjalanan wisata yang berbasiskan pada alam yang mengandung dimensi learning dan mengandung pesan pembangunan berkelanjutan (Weaver ,2001). Suatu konsep yang sangat ideal, dalam perspektif ranah manajemen wisata pada umumnya termasuk ekowisata akan meliputi tiga komponen yaitu place sebagai lanskap wilayah dengan eco-lodge-nya dan produk (destinasi) ekowisata, pengunjung dan masyarakat lokal (*host community*) (Mason, 2003).

Kegiatan dari pariwisata yang mempunyai *multiplier effect*, ekowisata akan terwujud apabila pemerintah dan semua *stakeholder* memahami dengan betul potensi yang dimilikinya dan membangun sesuai dengan kondisi dan sistuasi lingkungan ekowisata itu. Permintaan terhadap ekowisata akan semakin meningkat dengan semakin terbatasnya sumberdaya alam yang masih asli. Pelaksanaan ekowisata yang tidak sesuai dengan *sustainable development* hanya akan mengakibatkan semakin luasnya kerusakan lingkungan sehingga sumber daya yang bagus tersebut semakin berkurang atau bahkan menjadi langka.

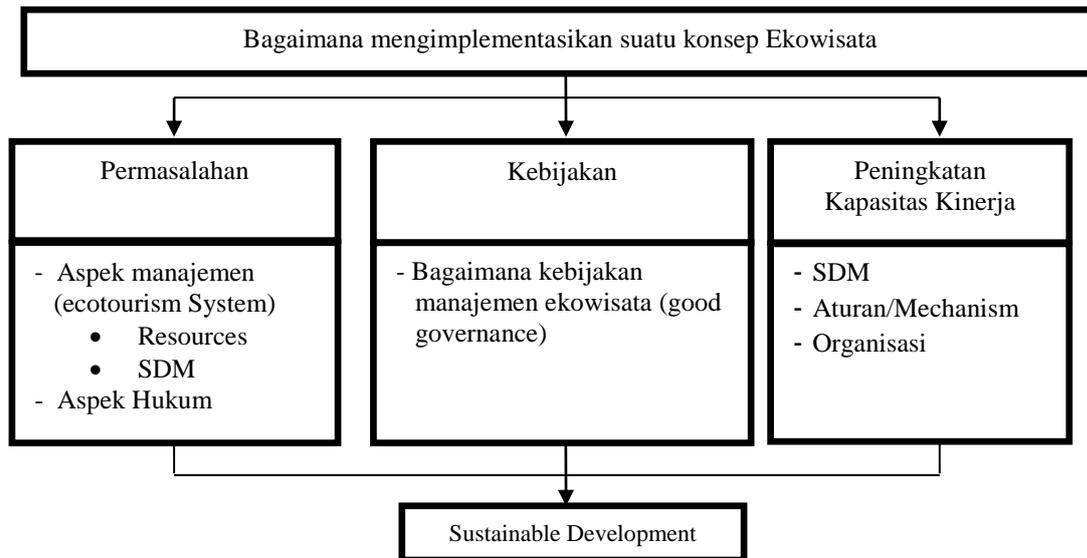
Pengembangan ekowisata yang diharapkan adalah pengembangan destinasi ekowisata dengan manajemen yang mendukung keberlanjutan (*sustainable*) baik aspek ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Pencapaian ini dilihat tidak hanya secara finansial dan ekonomis menguntungkan negara, daerah dan masyarakat serta secara sosial budaya dapat diterima oleh seluruh *stakeholder* yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan ekowisata yang menunjukkan kelestarian ekologi juga tercapai.

B. METODOLOGI

Permasalahan yang dihadapi dalam manajemen ekowisata adalah bagaimana mengimplementasikan suatu konsep ekowisata. Berdasarkan hal tersebut makalah ini terbagi menjadi tiga ulasan utama yang terdiri dari ekowisata dan permasalahannya, arah kebijakan manajemen ekowisata dan peningkatan kapasitas kinerja manajemen ekowisata. Berdasarkan ketiga aspek tersebut kemudian akan menghasilkan suatu upaya dalam memperkenalkan dan memahami suatu konsep ekowisata dan dapat diimplementasikan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Jenis data yang diambil dalam penyusunan makalah ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penyusunan makalah ini yaitu melalui studi literatur atau studi pustaka. Studi pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data yang berasal dari karya ilmiah, *text book*, pelaporan, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan makalah. Studi pustaka

atau studi literatur dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran baik mengenai permasalahan dalam ekowisata, arah kebijakan manajemen ekowisata dan peningkatan kapasitas kinerja manajemen ekowisata. Analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam mendeskripsikan data yang didapatkan secara jelas, dilihat dari segi permasalahan, kebijakan maupun peningkatan kapasitas kinerja manajemen ekowisata.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Makalah

C. PEMBAHASAN

1. PERMASALAHAN, KEBIJAKAN, DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

1) Ekowisata dan Permasalahannya

Ekowisata menjadi konsep yang strategis untuk menjamin generasi mendatang dalam pemanfaatan *resources* secara berkelanjutan. Ekowisata sebagai produk wisata dengan segmen pasar relatif terbatas atau sebagai konsep pariwisata menciptakan hubungan timbal balik saling mengisi antara pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat adat dan lokal serta kelayakan ekonomi dan kelayakan usaha. Dalam perkembangan ekowisata menghadapi berbagai permasalahan dalam implementasinya yaitu:

- a) Sistem kebijakan pemerintahan (*government*) yang belum secara komprehensif memahami ekowisata dan peran serta pemerintah belum optimal. Dalam hal perangkat kebijakan, pemerintah telah berupaya mengakomodir kepentingan lingkungan dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang menyangkut konservasi maupun pariwisata serta ekowisata. Perangkat peraturan tersebut juga belum dipahami secara utuh dan disosialisasikan dengan baik kepada semua *stakeholder* khususnya kementerian yang sangat terkait dalam pengembangan ekowisata serta sumberdaya manusia di bawahnya, sehingga bukan hanya pada lingkup

eksekutif dan legislatif. Sosialisasi dan pemahaman sama mengenai perangkat aturan juga diperlukan pada tingkatan yudikatif sehingga mereka dapat berperan untuk terus mendampingi dalam hal penegakan aturan (*law enforcement*). Beberapa peraturan yang menyangkut konservasi dan lingkungan sebagai dasar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Peraturan Perundangan Kepariwisata dan Konservasi

NO	PERATURAN PERUNDANGAN	MENGATUR TENTANG
1	Undang-undang No. 10 Tahun 2009	Kepariwisata
2	Undang-undang No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya
3	Undang-undang No. 41 Tahun 1999	Kehutanan
4	Undang-undang No. 5 Tahun 1992	Benda Cagar Budaya
5	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6	Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2010	Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
7	Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996	Penyelenggaraan Kepariwisata
8	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
9	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007	Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
10	Peraturan Menteri kehutanan Nomor:P.19/Menhut-II/2004	Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan kawasan pelestarian Alam
11	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009	Pedoman pengembangan ekowisata di daerah
12	Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor: 660.1/836/V/Bangda tanggal 28 April 2000	Pedoman umum pengembangan ekowisata daerah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan dukungan pemerintah dalam mengembangkan ekowisata di daerah tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 33 Tahun 2009. Peraturan ini menjelaskan bahwa dalam rangka pengembangan ekowisata di daerah secara optimal perlu strategi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, dan melibatkan pemangku kepentingan. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dalam

peraturan yang lebih teknis lagi dan dapat menjadi *starting point* bagi pemerintah daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengembangan ekowisata sesuai dengan potensi sumberdaya ekowisata masing-masing dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemahaman dan peran serta pemerintahan (*government*) yang belum optimal terkait penyelenggaraan ekowisata perlu ditingkatkan. Langkah yang perlu dilakukan adalah pergeseran paradigma kebijakan publik menjadi *good governance* (tata kelola yang baik) sehingga diharapkan mampu mengakomodir kepentingan ekowisata. Pendekatan *good governance* ini dipopulerkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992) dengan 10 prinsip yang menekankan perlunya birokrasi untuk berpikir secara wirausaha dan dalam berhubungan dengan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani. Hal ini sesuai dengan pilar ekowisata sosial budaya. Pergeseran paradigm kebijakan publik *government* dan *good governance* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Pergeseran Kebijakan Publik

Aspek	<i>Government</i> (Pemerintah)	<i>Governance</i> (tata kelola)
Proses perumusan kebijakan	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah • <i>Stakeholder</i> • Analisis kebijakan • Independent think
Penetapan kebijakan	Pemerintah	Pemerintah
Analisis kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah • Publik contractor • Government think 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Stakeholder</i> • Analisis kebijakan • Independent think

Sumber: Munandar, 2007 (hand out kebijakan dan pengelolaan ekowisata)

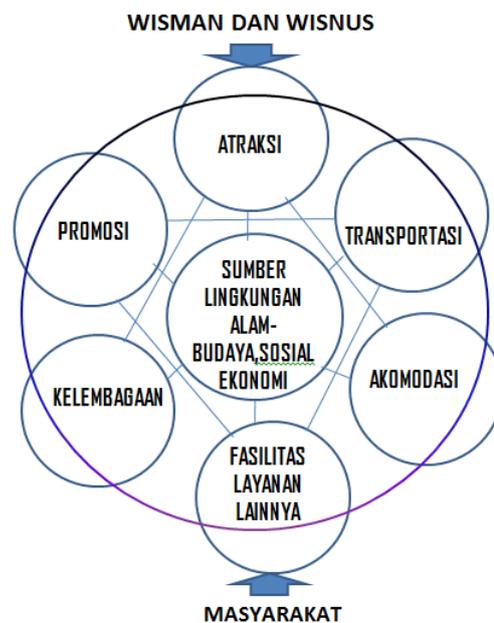
- b) Kontribusi yang masih rendah dari kegiatan ekowisata di Indonesia yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam pengembangan ekowisata selayaknya masyarakat lokal mendapat manfaat secara ekonomi. Umumnya dalam pengembangan ekowisata, masyarakat masih termarginalkan. Jika masyarakat mendapatkan manfaat/keuntungan finansial dan dilibatkan dalam kegiatan ekowisata maka masyarakat akan peduli dan merasa memiliki serta melindungi keberlanjutan *resources* ekowisata.

Kontribusi wisata terhadap masyarakat dalam hasil penelitian Sunarminto (2002) menunjukkan di Buleleng, kegiatan ekoturisme pada wisata bahari Pulau menjangan-Taman Nasional Bali Barat menjadi kegiatan ekonomi non basis hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian wialayah dengan nilai LQ (Location Quotient) 0,45 pada tahun 1995. Pendapatan langsung kepada masyarakat local sebesar 15 % dari perkiraan nilai ekonomi ekoturisme wisata bahari di TNBB pada tahun 1996 yaitu sebesar± 0,77 miyar. Contoh kasus lainnya berkaitan dengan kontribusi ekowisata di Taman Marga Satwa Monkey Mia (Australia Barat) dan Harvey Bay (Queensland) telah memberikan kontribusi

terhadap ekonomi regional masing-masing sebesar 5-11% dan 2-4% terhadap total pendapatan regional (Stoeckl et al.,2005). Botswana (Afrika) salah satu lokasi wisata yaitu Taman Buru Okavango Delta telah memberikan peningkatan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat.

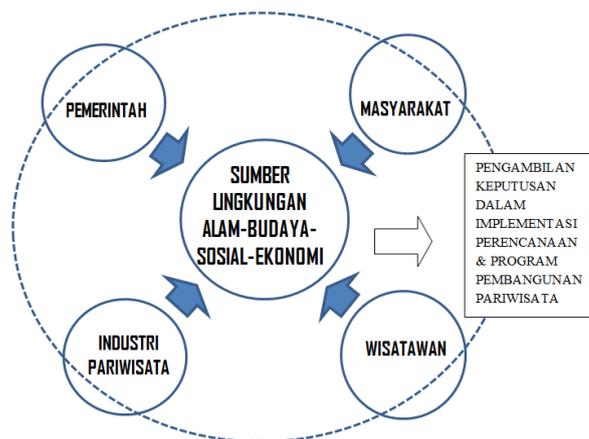
- c) Pengetahuan tentang biodiversity yang belum komprehensif dalam pengembangan ekowisata. Biodiversity mencakup keanekaragaman pada tingkat ekosistem, species dan genetic. Dalam kegiatan ekowisata diperlukan pemahaman dan pengetahuan mengenai biodiversity itu sendiri. Pengetahuan ini sebagai dasar dalam pemanfaatan secara bijak. Saat ini yang terjadi adalah permasalahan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tidak disertai dengan pertumbuhan etika lingkungan manusia, selain itu terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wisata yang tidak pro lingkungan dan terjadinya perubahan iklim. Hal-hal tersebut berdampak pada kerusakan dan penyusutan keanekaragaman hayati dan lingkungan global yang secara langsung akan berpengaruh terhadap resources ekowisata yang akan dikembangkan dan permintaan (demand) dari ekowisata ke depannya.
- d) Kapasitas SDM dan kapasitas manajemen yang belum memenuhi standar dalam pengembangan ekowisata. Sumber daya manusia yang perlu dibentuk dalam kaitan kegiatan ekowisata adalah membentuk etika dan moral SDM yang pro konservasi kehati dan LH. Hal ini sangat terkait dengan value terhadap SD Kehati dan lingkungannya, termasuk value aspek sosial-budaya dan kondisi ekonomi. Upaya peningkatan kapasitas SDM dapat melalui peran pendidikan konservasi kehati dan lingkungan sehingga dapat mengubah keputusan manusia yang bermoral dan etika konservasi & lingkungan. Manajemen ekowisata memerlukan SDM yang kompeten dalam “memproduksi” dan memahami perilaku produknya yang tunduk pada hukum-hukum (teori-teori) lingkungan yaitu pertumbuhan, sistem dan *behavior* (Mihalic, 2002) dan teori perkembangan produk (Mason, 2003). Sebagai produk industry yang dapat mengalami kejenuhan (Mason, 2003) pengembangan ekowisata juga memerlukan SDM dengan kompetensi marketing terhadap pengunjung. Kapasitas SDM dan manajemen yang memenuhi standar akan berdampak kepada kemampuan menyajikan interpretasi sumberdaya alam dan budaya yang berakhir pada permintaan serta kepuasan wisatawan. Kemampuan interpretasi menjadi penting karena berkaitan dengan kemampuan menggali dan menafsirkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sumber-sumber daya alam maupun budaya, kemampuan interpretasi juga mengembangkan destinasi yang memiliki kekhasan sumberdaya alam dan budaya, memberikan pembelajaran tentang lingkungan alam dan budaya setempat. Hal lain dalam kapasitas SDM yang baik dalam upaya mengembangkan dan memperkenalkan aspek interpretasi dalam desain produk ekowisata, memberikan pemahaman dan berlanjut kepada peningkatan apresiasi wisatawan dan masyarakat terhadap lingkungan alam dan budaya setempat serta memanfaatkan lingkungan untuk mendapatkan optimasi efek bagi kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Sekartjajarini, 2008).

- e) Kontribusinya bagi kepentingan konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang masih rendah. Kegiatan ekowisata perlu meningkatkan kontribusi finansial kepada kegiatan konservasi (*provides direct financial benefits for conservation*). Ekowisata dapat meningkatkan perlindungan lingkungan, pendidikan, penelitian yang dapat dilakukan melalui mekanisme penarikan biaya masuk. Hal ini dapat didukung melalui peraturan mengenai retribusi di kawasan konservasi atau pemerintah daerah membuat peraturan teknis dalam mengatur penarikan biaya masuk yang meningkatkan kegiatan konservasi.
- f) Sinergitas dari lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi, dukungan swasta, dan dukungan pemerintah baik nasional-propinsi-maupun pemerintah daerah kabupaten/kota belum terjadi dan belum didukung secara penuh oleh masyarakat. Pengembangan ekowisata masih banyak yang belum terintegrasi dengan pembangunan wilayah. Berbicara mengenai ekowisata dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan maka membicarakan sistem. Hal ini memerlukan sinergitas dari berbagai *stakeholder* dan didukung produk kebijakan yang dapat dituangkan dalam peraturan daerah yang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mampu mengakomodir pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini Peraturan daerah dalam bentuk petunjuk teknis ekowisata dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Alam (RIPPDA) juga diharapkan mampu mengakomodir seluruh *stakeholder*. Skema *tourism system* secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2.
Skema Tourism System (Sekartjakrajini,2008)

Sinergitas *stakeholder* sangat diperlukan karena akan menentukan level pengaruh terhadap pengembangan dan interest terhadap konservasi biodiversitas. Permasalahan yang umum terjadi adalah actors dalam pengembangan ekowisata masih mengedepankan kepentingan masing-masing sehingga ke depan jika tidak segera dibenahi hal ini dapat berdampak pada lingkungan. Skema *Tourism actors* dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3.
***Tourism Actors* (Sekartjakrarini,2008)**

- g) Pengembangan wirausaha *ecotourism* belum secara tepat memadukan kepentingan-kepentingan intelektual, spiritual, dan pengendalian emosional. Dalam hal ini upaya yang diperlukan dalam menghadapi kondisi yang semakin krisis maka diperlukan pola baru yang disebut *ecosophy* (Naess 1970 dalam Alikodra, 2011). Pengembangan wirausaha ekowisata yang mencakup tiga dimensi bagi etika manusia yaitu spiritual, intelektual dan emosional diharapkan mampu membangun tata kehidupan yang sesuai dengan hati, indera dan otak.

Berdasarkan hal tersebut ekowisata dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan pemanfaatan sumberdaya untuk kesejahteraan umat (khususnya masyarakat lokal) pada saat ini maupun yang akan datang. Proses eksploitasi untuk *site development*, penggunaan energi secara berlebihan, kegiatan yang terlalu konsumtif dapat dihindari, sehingga proses pemanfaatannya tetap memeperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

2) Kebijakan Dalam Ekowisata

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kebijakan adalah serangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan sebuah program. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan

atau melarang suatu perilaku kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan

James E. Anderson (1984) memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (1978) mengemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato pejabat teras pemerintah serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

James Anderson (1994) menyatakan adanya keharusan untuk membedakan antara apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan di lapangan. Hal ini menjadi penting karena kebijakan bukan hanya sebuah keputusan sederhana untuk memutuskan sesuatu dalam suatu momen tertentu, namun kebijakan harus dilihat sebagai sebuah proses. Untuk itulah pengertian kebijakan sebagai suatu arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), dan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*), (Winarno, 2007)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah konsep, asas dan pedoman yang harus dan tidak harus dilaksanakan dari sebuah program yang mempunyai sasaran dan tujuan tertentu. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru (Dunn, 2003).

3) Good Governance For Ecotourism

Ekowisata merupakan solusi dari ketimpangan-ketimpangan ekonomi yang dalam bisnis pada umumnya lebih mengedepankan kepentingan kaum kapitalis dari pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan masalah-masalah ekologi. Ekowisata merupakan bentuk nyata dari pembangunan yang berkelanjutan, dimana konsep dasar dari pengembangan ekowisata adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dengan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata baik secara langsung maupun tidak langsung dimana peningkatan perekonomian tersebut pasti berdampak pada perbaikan kesejahteraan. Selain itu ekowisata juga fokus pada bagaimana meminimalis dampak wisata terhadap ekologi, bahkan ekowisata juga merupakan bentuk nyata dari kegiatan konservasi, dimana 3 aspek dalam konservasi yaitu melindungi, melestarikan dan memanfaatkan SDA dan budaya serta peninggalan-peninggalan kuno sangat nyata dilaksanakan dalam kegiatan ekowisata tersebut.

Tapi kenyataannya ekowisata di Indonesia masih sangat jauh tertinggal dibanding negara-negara lain di Asia. Kekayaan alam dan budaya Indonesia yang

dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan, dilindungi dan dimanfaatkan agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan serta peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terbentang sejauh 5.120 km dari timur ke barat, 1.760 km dari utara ke selatan di sepanjang garis katulistiwa dengan lebih dari 17.100 pulau yang 6.000 diantaranya sudah berpenghuni 300 ragam suku bangsa dan etnis, 742 bahasa dan dialek, dan memiliki 8 *world heritage culture site* bahkan menduduki peringkat 39 dari *culture heritage* dari 139 negara oleh WWF (sumber: data Kemenpar)

Tapi sangat disayangkan kebijakan pariwisata khususnya untuk ekowisata masih kurang berpihak pada pengembangan ekowisata tersaebut. Padahal dengan modal kekayaan yang sedemikian banyak sudah selayaknya jika Indonesia dapat mengembangkan pariwisata khususnya ekowisata dengan tata kelola yang baik dan professional melalui perencanaan yang matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang yang ada serta berinovasi untuk mengembangkannya. Tata kelola yang buruk merupakan salah satu penyebab atau akar dari segala kegagalan program. *Good Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti tata kelola perusahaan, pemerintahan internasional, pemerintahan nasional, lokal juga dalam pelaksanaan ekowisata (*Good Governance For Ecotourism*).

Pedoman umum *Good Governance* dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 1999 dan disempurnakan kembali pada tahun 2006. Hal ini dilakukan agar tata kelola perusahaan dapat berjalan lebih baik. Tetapi dalam penerapannya *Good Governance* masih belum maksimal salah satunya dikarenakan dorongan terhadap penerapan *Good Governance* masih pada tahap aturan dan belum sampai keranah etika (Prasetyanto, 2008).

Governance, yang diterjemahkan menjadi tata kelola baik dalam sektor publik dan sektor privat atau swasta dalam mendukung ekowisata di Indonesia. Tata kelola tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Penerapan *Good Governance* baik di sektor publik maupun swasta diharapkan dapat membantu proses transformasi kearah yang lebih baik, salah satu contoh tools yang dapat digunakan dalam transformasi tersebut adalah *Balance Score Card* yang didalamnya terdapat KPI sebagai indikator ukuran kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi dan perbaikan kinerja baik sektor publik maupun swasta. Selain itu kerjasama yang baik antara kedua sektor tersebut mutlak sangat dibutuhkan, perbaikan tata kelola hanya pada sektor publik, tanpa dukungan perbaikan tata kelola pada sektor swasta atau sebaliknya hanya akan membuat pembangunan dan pengembangan ekowisata berjalan ditimpak. Kebijakan publik hanya akan menjadi wacana tanpa ada perbaikan tata kelola pada sektor swasta sebagai pelaksan. Pengelolaan sektor swasta yang sudah baikpun tanpa adanya payung kebijakan

publik dari pemerintah hanya akan membuat sektor swasta berjalan secara liar dan tanpa arah.

Good governance for ecotourism baik untuk sektor publik maupun swasta memiliki 8 karakteristik utama. Ini adalah partisipatif, aturan hukum, transparan, responsif, akuntabel, berorientasi konsensus, ekuitas dan inklusivitas serata efektif dan efisien.

- a. Partisipasi. Partisipasi dari masyarakat merupakan salah satu fokus dalam pengembangan ekowisata. Semaksimal mungkin pembangun ekowisata dapat memberikan impact yang positif bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial.
- b. Aturan hukum. *Good governance* memerlukan kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan secara adil. Hal ini juga memerlukan perlindungan penuh terhadap hak asasi manusia, terutama yang minoritas. Penegakan hukum yang berimbang, pengadilan yang independen dan penegakan hukum yang tidak berpihak.
- c. Transparansi. Hal ini menyangkut hak-hak para *stakeholder* dalam hal informasi. Ini berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan langsung diakses oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut dan penegakannya. Ini juga berarti bahwa informasi yang cukup disediakan dan diberikan dalam bentuk yang mudah dimengerti.
- d. *Responsiveness*. *Good governance* mensyaratkan bahwa lembaga-lembaga dan prosesnya mengedepankan melayani kepada semua *stakeholder* dalam jangka waktu yang wajar. Dan dalam pengelolaan ekowisata prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari sebuah wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan peranan, menjadi profesional yang beretika dan memelihara lingkungan bisnis ekowisata yang sehat.
- e. Berorientasi konsensus. Dalam suatu masyarakat tertentu ada beberapa aktor dengan titik pandang yang berbeda. *Good governance* memerlukan mediasi dari kepentingan yang berbeda dalam masyarakat untuk mencapai konsensus yang luas dalam masyarakat tentang apa yang ada dalam kepentingan terbaik dari seluruh masyarakat dan bagaimana hal ini dapat dicapai. Hal ini juga memerlukan perspektif yang luas dan jangka panjang tentang apa yang dibutuhkan untuk pembangunan ekowisata dan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut.
- f. Ekuitas dan inklusivitas. Dalam sebuah masyarakat kesejahteraan dapat diartikan bahwa semua anggotanya merasa bahwa mereka memiliki kepentingan di dalamnya dan tidak merasa dikecualikan. Hal ini memerlukan semua kelompok, tetapi terutama yang paling rentan, memiliki peluang untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- g. Efektivitas dan efisiensi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa proses pengelolaan ekowisata menghasilkan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan dalam penggunaan sumber daya yang mereka miliki dengan sebaik mungkin. Konsep efisiensi dalam konteks *good governance*

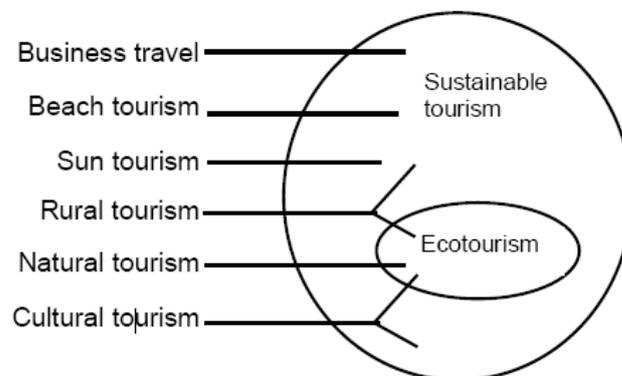
for ecotourism juga mencakup pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan.

- h. Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan persyaratan utama dari *good governance for ecotourism* karena akuntabilitas merupakan tanggungjawab pengelola melalui pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power* antar *stakeholder*. Bukan hanya lembaga pemerintah tetapi juga sektor swasta dan organisasi harus bertanggung jawab kepada publik dan *stakeholder* kelembagaan mereka. Siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, bervariasi tergantung pada apakah keputusan atau tindakan yang diambil bersifat internal atau eksternal dalam suatu organisasi atau lembaga. Akuntabilitas tidak dapat ditegakkan tanpa transparansi dan aturan hukum.

4) Peningkatan Kapasitas Kinerja

Peningkatan kapasitas kinerja suatu organisasi sangat penting dan perlu dilakukan, termasuk dalam pengelolaan kegiatan ekowisata. Pengertian peningkatan kapasitas atau sering juga disebut dengan pembangunan kapasitas, pengembangan kapasitas, pemberdayaan kapasitas dan penguatan kapasitas adalah suatu peningkatan kemampuan dari suatu organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan yang disusun oleh organisasi tersebut (Bartle).

Menurut The International Ecotourism Society (TIES), ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan. Kegiatan ekowisata merupakan bagian yang tidak terlepas dari kegiatan pariwisata atau turisme yang ruang lingkungnya meliputi lima jenis kegiatan yaitu wisata bahari (*beach and sun tourism*), wisata pedesaan (*rural and agro tourism*), wisata alam (*natural tourism*), wisata budaya (*cultural tourism*), atau perjalanan bisnis (*business travel*). Posisi ekowisata (*ecotourism*) berpijak pada tiga kaki sekaligus, yakni wisata pedesaan, wisata alam dan wisata budaya (Nugroho,).



Gambar 3.
Turisme dan Ekowisata (Wood, 2002 dalam Nugroho)

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan peningkatan kapasitas kinerja manajemen ekowisata adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kerja dari seluruh unsur terkait untuk mencapai suatu tujuan keberhasilan kegiatan ekowisata dengan menggunakan sumberdaya secara efektif.

5) Kondisi Ekowisata yang Diharapkan

Ekowisata menuntut persyaratan bagi pelestarian alam. Dengan demikian ekowisata adalah “Wisata alam berdampak ringan yang menyebabkan terpeliharanya spesies dan habitatnya secara langsung dengan peranannya dalam pelestarian dan atau secara tidak langsung dengan memberikan pandangan kepada masyarakat setempat, untuk membuat masyarakat setempat dapat menaruh nilai, dan melindungi wisata alam dan kehidupan lainnya sebagai sumber pendapatan” (Goodwin, 1997 dalam Satrayuda, 2010).

Berbeda dengan wisata pada umumnya, ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menarik perhatian besar terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai salah satu isu utama dalam kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial maupun ekologi. Hal ini akan terus berlangsung, terutama didorong oleh dua aspek, yaitu: (1) ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungannya makin tinggi, (2) keberpihakan masyarakat kepada lingkungan makin meningkat. Pendekatan aspek yang pertama adalah menyangkut kemampuan dan kebutuhan manusia dimasa mendatang akan keberadaan sumber daya dan lingkungan makin tinggi, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan makin meningkatnya tekanan masyarakat nasional maupun internasional, perlunya perlindungan lingkungan.

2. SASARAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA MANAJEMEN EKOWISATA

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ekowisata terdiri dari berbagai unsur lintas sektoral dengan jumlah yang sangat banyak. Pengembangan kapasitas harus dilakukan baik SDM yang terlibat secara internal maupun eksternal pengelolaan usaha ekowisata. Pembinaan SDM internal dapat dilakukan dengan membangun karakter melalui pendidikan dan pelatihan. Kegiatan pelatihan kepemimpinan untuk orang dewasa menurut Klan (2007) dapat dilaksanakan secara langsung dengan melakukan praktik atau pengalaman melakukan kegiatan yang antara lain meliputi:

- 1) Partisipasi (antara lain melalui diskusi, aktivitas praktik, dan menjawab pertanyaan)
- 2) Problem solving
- 3) Pengalaman melakukan secara langsung,
- 4) Penggunaan *hand out* yang lengkap dan mendetil,
- 5) Pengulangan kegiatan,
- 6) Mengikuti/menirukan kegiatan yang dilakukan

Mengacu pada Direktorat Produk Wisata (2009), pengembangan kapasitas SDM, khususnya masyarakat setempat dapat dilakukan dengan:

- 1) Membentuk kelompok atau lembaga untuk pengelolaan kegiatan ekowisata di daerahnya, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat.
- 2) Pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat setempat diterapkan sedapat mungkin terhadap sarana dan pra-sarana ekowisata, kawasan ekowisata.
- 3) Pembekalan kemampuan sebagai pemandu bagi orang setempat.
- 4) Perintisan, pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata yang bertanggungjawab dari masyarakat setempat.

2) Aturan/Mekanisme

Peningkatan kapasitas manajemen ekowisata ditinjau dari aturan/mekanisme yang ada perlu dilakukan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Aturan/mekanisme perlu ditetapkan karena dalam kegiatan ekoturisme melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan dan kewenangan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Mengacu pada indikator keberhasilan kegiatan turisme dalam Anonim (2002), terdapat beberapa hal yang perlu disusun/diperbaiki terkait dengan:

- a) Strategi nasional untuk turisme berkelanjutan yang selalu diperbaharui secara periodik.
- b) Pengembangan strategi turisme regional untuk mengantisipasi isu lintas bidang, termasuk pencemaran lingkungan
- c) Model pengukuran untuk mengendalikan dan mengawasi operator/pelaksana, fasilitas, dan kawasan ekoturisme.
- d) Penilaian dampak berkelanjutan, sistem audit lingkungan dan sosial, khususnya selama dalam pembangunan turisme.
- e) Menyusun atau menguatkan peraturan yang ada untuk mengelola kawasan ekoturisme.

Upaya penguatan aturan/mekanisme juga dimuat dalam Direktorat Produk wisata (2009) antara lain mendorong atau mengembangkan:

- a) Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang keimigrasian di daerah tujuan ekowisata.
- b) Prosedur sertifikasi pemandu sesuai dengan kondisi lokasi wisata
- c) Regulasi yang mengatur standar kelayakan *homestay* sesuai dengan kondisi lokasi wisata
- d) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku bagi para pelaku ekowisata terutama masyarakat
- e) Skema di mana tamu secara sukarela terlibat dalam kegiatan konservasi dan engelolaan kawasan ekowisata selama kunjungannya (*stay & volunteer*).

3) Organisasi

Pengelolaan kegiatan ekowisata perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan kapasitasnya. Mengacu pada Direktorat Produk wisata (2009), beberapa aspek dalam ekowisata yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Perlunya pengaturan jumlah pengunjung supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat.
- b) Pola wisata harus ramah lingkungan (harus memperhatikan aspek ekologi).
- c) Pola wisata ramah budaya dan adat setempat (memiliki nilai edukasi dan wisata).
- d) Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal (memiliki nilai ekonomi).
- e) Meningkatkan dan menambah sarana prasarana pendukung serta mendorong terbuka dan terhubungnya akses ke/dari dan antar daerah tujuan ekowisata tanpa merusak aset utama ekowisata yaitu alam yang asli melalui peningkatan dan optimalisasi jalur transportasi udara.

Pihak yang terlibat/berperan dalam kegiatan ekowisata berasal dari berbagai organisasi dengan jumlah yang cukup banyak. Pratiwi, et al (2008) yang menyatakan bahwa semua *stakeholder* memiliki peran untuk pencapaian kriteria kecukupan ekowisata. Mengacu pendapat tersebut, maka pengembangan kapasitas perlu dilakukan pada masing-masing *stakeholder* sebagai berikut.

- a) pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan, penyusun pedoman pelaksanaan, kriteria dan standar operasional, pemberi izin dan sanksi, dan pembina, hendaknya memiliki integritas teknis, moral, bertanggung jawab kepada rakyat.
- b) Lembaga legislatif hendaknya dapat menyusun berbagai peraturan atau kebijakan yang efektif, independen dan adil.
- c) *stakeholder* pendukung (lainnya) sebagai penyedia modal usaha, jasa, sarana dan prasarana, dan pemenuhan kewajiban bagi pemegang izin usaha;
- d) pemerintah daerah sebagai pelaksana sosialisasi program pemerintah, penegakan hukum, pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi serta rekomendasi izin pariwisata;
- e) masyarakat sebagai pemeran yang pasif berupa pemberi saran, pertimbangan, dan partisipasi pada program yang dibawa pihak luar, serta peran pengawasan dan pemeliharaan.

Hal lain yang penting dalam mengembangkan kapasitas organisasi ekowisata adalah dalam hal mengembangkan pemasaran, strategi pencitraan (*branding*) dan promosi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a) Mengikuti kegiatan promosi dan pemasaran berskala internasional.
- b) Melakukan survei pasar secara berkala untuk mengetahui dinamika pasar.
- c) Mengidentifikasi target pasar untuk produk ekowisata yang dikembangkan.

- d) Menyelenggarakan promosi secara khusus (fam trip, media trip).
- e) Membuka dan menjalin hubungan terbuka dengan pihak swasta dan mendorong adanya kesepakatan antara organisasi masyarakat dengan *tour operator*.

D. SIMPULAN

- 1) Pengembangan kapasitas manajemen ekowisata harus diarahkan agar mampu mencapai tujuan ekonomis, sosial, dan ekologis dari ekowisata dengan menggunakan sumber daya yang efektif.
- 2) Manfaat dari kegiatan pengembangan kapasitas hendaknya mampu Mendidik wisatawan; Meningkatkan kesadaran dan penghargaan akan lingkungan dan budaya; bermanfaat secara ekologi, sosial, ekonomi; memudahkan penentu kebijakan dalam menyusun kebijakan
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan akademik melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai (khususnya SDM yang terkait dengan kegiatan pengelolaan usaha/industri ekowisata), atau dengan penguatan dalam komunitas masyarakatnya dalam mengelola kegiatan ekowisata.
- 4) Peningkatan kapasitas peraturan atau mekanisme sangat diperlukan, karena banyaknya pihak yang terkait dengan berbagai kepentingan dan kewenangan yang berbeda agar tidak terjadi *conflict of interest*.
- 5) Peningkatan kapasitas organisasi dilakukan untuk mengantisipasi jumlah dan perilaku pengunjung, kelestarian kawasan, keberhasilan pencapaian tujuan, maupun pemasaran jasa ekowisata yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alikodra, HS. 2011. Ruang Lingkup Anjak Biodiversitas (hand out kuliah). Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata. Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor.
- Anonim. (2002). *Sustainable Tourism–Turning The Tide*. Towards Earth Summit 2002 Economic Briefing No. 4
- Bartle P, diterjemahkan oleh Bessie Utomo Lucas. (___). *Pengembangan kapasitas, Menstimulasi Kekuatan Organisasi Yang Meningkatkan*
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Direktorat Produk Pariwisata. 2009. *Prinsip Dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia.
- George C. Edwards III dan Ira Sharkansky. 1978. *The Policy Predicament: Making and Implementing Publik Policy*. W.H. Freeman and Company. San Francisco
- James E. Anderson. 1984. *Publik Policy Making*. cet. ke-3. Holt, Rinehart and Winston. New York
- James E. Anderson. 1994. *Publik Policy Making: An Introduction*. cet. ke-II. Houghton Mifflin Company. Boston.
- Klann G. 2007. Building Character Strengthening the Heart of Good Leadership. John Wiley & Sons, Inc. San Francisco.
- Mason, P. 2003. Tourism Impacts. Planning and Management. Elsevier. Amsterdam.
- Mihalic, T. 2003. Economic Instruments Of Environmental Tourism Policy Derived From Environmental Theories. In DA Fennell and RK Dowling (ed) Ecotourism Policy and Planning. Cambridge: CAB International.
- Munandar, A. 2007. Kebijakan Ekowisata (hand out kuliah Kebijakan dan Pengelolaan Ekowisata). Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. IPB. Bogor
- Prasetyantoko. A. 2008. Corporate Governance : Pendekatan Institusional. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Pratiwi, et al (2008), *Forum Pascasarjana Vol. 31 No. 1 Januari 2008: 79-88*
- Sunarminto, T. 2002. Dampak ekoturisme wisata bahari pulau Menjangan Taman Naional
Bali Barat terhadap ekonomi masyarakat dan kelestarian kawasan. Tesis Program Pascasarjana. Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan. IPB. Bogor.

- Sekartjakrarini, S. 2008. Ekowisata : Konsep, Manfaat dan Tantangan. Makalah seminar Nasional Ekowisata Pengembangan Potensi Ekowisata Daerah. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Sekolah Pasca Sarjana. IPB. Bogor
- SASTRAYUDA, GS. (2010). *Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure*
- Sastrayuda, GS. (2010). *Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure.*
- Silalahi, WV. 2012. 8 Juta Turis Bakal Kunjungi RI di 2012.
<http://www.detikfinance.com>. diakses 3 Oktober 2012, jam 16:40 WIB]
- Winarno. Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo. Yogyakarta
- Weaver, D. 2001. *Ecotourism*. Milton, Qld; Wiley & Sons.